

## **Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama**

### **Abdullah Idi**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
Email: [abdullahidi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:abdullahidi_uin@radenfatah.ac.id)

### **Jamali Sahrodi**

Program Pascasarjana  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia  
Email: [jamali\\_sahrodi@yahoo.co.id](mailto:jamali_sahrodi@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Salah satu permasalahan berbangsa yang mendasar akhir-akhir ini adalah kecenderungan terjadinya degradasi atau pergeseran moralitas sosial yang melibatkan anak-anak usia sekolah, usia remaja dan mahasiswa/ pemuda. Tidak jarang mereka disinyalir terlibat dalam beragam bentuk perilaku sosial yang menyimpang (social deviance), seperti: tindakan kriminal, narkoba, minuman keras, begal, free-sex, rendahnya sopan-santun dan rasa hormat antarsesama, kebut-kebutan di jalan raya, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tawuran, yang sekaligus bertanda buruknya moralitas sosial di kalangan generasi muda. Pendidikan karakter (akhlak) melalui optimalisasi peranan pendidikan agama diharapkan sebagai salah satu upaya reduksi dan preventif terhadap perilaku demoralisasi sosial yang sedang melanda generasi muda (pelajar, remaja dan mahasiswa/pemuda) yang diharapkan dapat meneruskan estafet kepemimpinan masa depan.

**Kata Kunci:** Moralitas Sosial, Peranan Pendidikan Agama

Pendidikan selalu diharapkan menjadi solusi strategi terhadap berbagai persoalan masa depan anak-anak, masa depan masyarakat, dan masa depan bangsa, sebagai ikhtiar memperbaiki harkat dan martabat kehidupan. Daniel U Levine & Robert J. Havighurst (1989, hal. 229) mengatakan:

*The school seeks to help young people from lower-status families rise on the social scale, and the extent to which society is meritocratic depends partly on how effective educational system is in this short. Thus, the social*

*class of young adults is determined partly by what they make out of their schooling, and partly by their social class origins.*

Memang ada perbedaan antara pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi yang hasilnya kasat mata dan dapat dirasakan segera. Sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberdayaan anak-anak merupakan bentuk dari kegiatan investasi sosial yang hasilnya akan kelihatan dalam waktu lama. Investasi sosial bagi anak-anak, seringkali terabaikan dalam kegiatan pembangunan, yang sekurangnya karena dua alasan. *Pertama*, parameter untuk mengukur pembangunan bidang sosial (pendidikan dan berbagai bentuk persoalan kerawanan anak-anak) relatif sulit dirumuskan dalam satuan angka yang konkret, sehingga cara yang paling mudah mengatasinya adalah dengan melupakannya (Suyanto, 2013, hal. 9-10). *Kedua*, isu tentang anak hanya dinilai sebagai urusan domestik yang akan dapat terselesaikan dengan sendirinya setelah isu lebih makro seperti kemiskinan dan krisis ekonomi telah dapat teratasi. Pemerintah terkadang berpandangan bahwa anak putus sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan tanggung jawab pribadi orang tuanya. Sama halnya ketika anak terserang busung lapar atau meninggal dunia karena kurang gizi, dan beragam persoalan anak-anak, semua selalu dikembalikan kepada tanggung jawab orang tuanya (Suyanto, 2013, hal. 10).

Syaiful Sagala (2013, hal. 249) mengungkapkan bahwa suatu negara membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, mampu mengatasi masalah dirinya sendiri, mampu mengatasi masalah dalam keluarga dan mampu mengatasi masalah di masyarakat. Pada tingkat tertentu dibutuhkan SDM yang mampu mengatasi masalah negara maupun masalah antarnegara. Jika SDM dalam suatu bangsa tidak mampu mengatasi dirinya sendiri, berarti manusianya dikategorikan orang miskin dan orang miskin menjadi beban negara, dan negara tersebut termasuk negara miskin. Agar negara tidak miskin, harus ada program pembangunan SDM yang terinci, jelas arahnya, jelas strateginya, dan jelas targetnya. Agar investasi *human capital* pada waktunya dapat menyediakan SDM yang handal dan mampu mengatasi permasalahan, sekaligus keuar dari status kemiskinan. Investasi *human capital* yang paling efektif dalam suatu bangsa atau negara adalah penguatan pada program pendidikan baik formal, informal, maupun non formal yang diatur dalam organisasi pengelolaan masing-masing. Organisasi pengelolaan pendidikan formal tentu bermuara pada organisasi satuan pendidikan seperti sekolah sebagai organisasi yang langsung memberikan layanan belajar kepada anak didik.

Sejak lama rasanya bangsa ini terus mengalami keprihatinan kompleks. Masih banyaknya kasus korupsi bahkan menjadi salah satu negara yang korupsinya pada level tertinggi, KKN melanda di berbagai institusi, meningkatnya kriminal, kekerasan, *anarchism*, premanisme, narkoba di kalangan pelajar, merosotnya disiplin, tumbuhnya budaya materialisme dan hedonism, merosotnya sopan santun, *tawuran* pelajar dan mahasiswa. Suatu hal yang paling memprihatinkan adalah keterlibatan para pelajar dan mahasiswa dalam berbagai tindakan *amoral*, kriminal, dan kekerasan.

Memang pada usia mereka termasuk sedang mengalami periode potensial bermasalah. Periode ini sering dikatakan sebagai *storm and drang period* (topan dan badai). Pada usia ini timbul gejala emosi dan tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka terkadang tampak menyimpang. Dari situasi konflik dan problem ini remaja tergolong dalam sosok pribadi yang tengah mencari identitas dan membutuhkan tempat penyaluran kreativitas. Jika tempat penyaluran tersebut tidak ada atau kurang memadai, mereka akan mencari berbagai cara sebagai penyaluran. Aksi dan perilaku menyimpang anak-anak usia sekolah dan remaja dapat berupa kekerasan verbal (mencaci maki) maupun kekerasan fisik seperti memukul dan meninju. Murray (Hall & Lindsey, 1993) didefinisikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Secara singkat agresi adalah tindakan untuk melukai orang lain atau merusak hak milik orang lain.

Apa diungkapkan di atas, merupakan segelintir dari sekian banyak perilaku menyimpang (*social deviance*) yang dilakukan kalangan pelajar, anak usia remaja, dan pemuda/mahasiswa pada akhir-akhir ini. Persoalannya, jika kondisi ini terus terjadi, patut diyakini bahwa proses pembangunan bangsa menuju masa depan yang diharapkan sulit diprediksi (*unpredictable*) dan bangsa ini juga sulit menjadi suatu negara maju. Hal itu semua memperlihatkan bahwa proses degradasi moralitas sosial ini semakin mengkhawatirkan dan memerlukan upaya antisipasi, salah satunya, dengan upaya membangun mengembangkan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak.

### **Anak Didik: Urgensi Pendidikan Karakter**

Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam pembangunan SDM dalam proses pembangunan bangsa. Dengan pendidikan, anak-anak diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan sains-teknologi tetapi juga sains agama (membentuk anak-anak menjadi berakhlak, berbudi pekerti, berkepribadian, dan berkarakter).

Pendidikan karakter, mulai ramai dibicarakan kembali pada dua dekade belakangan. Thomas Lickona (1993, hal. 1-10), yang menyadarkan dunia pendidikan di Amerika Serikat tentang pentingnya pendidikan karakter (bagi anak-anak) untuk mencapai cita-cita pendidikan. Lickona, mengatakan bahwa program pendidikan yang bertumpu pada pembentukan karakter ini berangkat dari keprihatinan atas kondisi moralitas sosial pada masyarakat Amerika. Pembentukan karakter ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan komunitas yang memiliki moral kemanusiaan, disiplin moral, demokratis, mengutamakan kerjasama dan penyelesaian masalah, dan mendorong agar nilai-nilai itu dipraktekkan di luar kelas (Octavia, 2014, hal. 10).

Selain itu, bertalian dengan pendidikan karakter (*character*), ada perbedaan akhlak, adab, moral, dan nilai. Imam al-Jurjani mengatakan bahwa *akhlak* merupakan bangunan jiwa yang berasal dari dua sumber. *Pertama*, sumber darinya perilaku spontan tanpa didahului pemikiran, berupa perilaku baik (akhlak baik) atau perilaku buruk atau akhlak tercela. Al-Jurjani memaknai akhlak sebagai keteguhan jiwa pada diri manusia, yang mendorong manusia berbuat baik dan buruk. Perilaku manusia, dalam hal ini, didorong dari dalam jiwanya. Akal pikiran dan hati nurani yang jernih mendorong perilaku baik, dan nafsu mendorong perilaku nista. Akhlak menjadi terpuji atau tercela tergantung pada tarik-ulur berbagai naluri dalam pergulatan batin manusia. Seorang berbudi luhur, merupakan orang yang mampu memenangkan budi pekerti luhur dan menekan dan mengalahkan nalurinya yang nista itu. *Kedua*, akhlak yang berasal dari usaha manusia (*muktasabah*). Jika 'akhlak' dan kata-kata yang seakar dengannya (*al-khuluq*) terdapat dalam al-Qur'an, kata 'adab' tidak terdapat dalam al-Qur'an. *Adab* dalam peradaban Arab pertama kali digunakan dalam makna kesusasteraan, yang bertalian dengan keindahan bahasa (Octavia, 2014, hal. 13).

Sedangkan nilai-nilai (*values*) setidaknya mempunyai empat tingkatan. *Pertama*, nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti: demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian dan kemajuan sosial, serta perwujudan diri dan penentuan diri. *Kedua*, nilai-nilai tingkat menengah, seperti: kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok, dan masyarakat yang baik. *Ketiga*, nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang profesional yang baik. Seperti dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri. *Keempat*, nilai-nilai dan norma-norma yang telah diinternalisasikan ke dalam diri individu, akan menjadi kerangka referensi individu tersebut sebagai

prinsip etik. Prinsip-prinsip etik itu menjadi dasar orientasi dan petunjuk bagi manusia dalam mengatasi beragam permasalahan kehidupan bertalian hubungan sosial dengan orang lain. Prinsip etika itu membantu pula dalam mengatur dan memberikan makna dan kesatuan yang bulat terhadap kepribadian manusia: motivasi manusia dalam memilih suatu perilaku, tujuan-tujuan, gaya hidup, serta memungkinkan manusia memiliki landasan pembenaran dan pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dilakukan manusia (Mufid, 2009, hal. 176-177).

Al-Mawardi mendefinisikan *adab* sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang dapat mengeluarkan dari segenap kesalahan dan kekeliruan, baik dalam hal kesalahan ucapan, perkataan, perilaku, tindakan dan moral. Al-Mawardi juga membagi adab menjadi *adab al-dunya* dan *adab al-din*. *Adab al-dunya* meliputi: (1) *etika sosial*, bertalian dengan ketertiban, dan pengaturan kenegaraan, kebangsaan, etika publik, politik, dan segenap persoalan yang bersifat kolektif di ranah sosial; (2) *etika individu* yang menempatkan masing-masing warga negara bertanggung jawab dalam memperbaiki perilaku dan menampakkan kebaikan personal. Sedangkan *adab al-din*, merupakan etika dalam standar aturan syari'at, seperti perintah dan larangan, hukum halal dan haram, ketaatan, dan kemaksiatan, dan lainnya (Octavia, 2014, hal. 13).

Dalam filsafat terdapat beberapa jenis teori tentang nilai (*value*). Teori tentang nilai disebut *axiology*, yang berasal dari kata *axia* yang berarti harga atau nilai (*worthy*) dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Filsuf yang banyak berbicara tentang nilai manusia adalah Max Weber (1874-1928) dan Nicolai Hartmann (1882-1950). Perilaku manusia dipengaruhi dan berdasar pada tata nilai yang dimiliki dan diyakininya. Orang akan berbuat ataupun tidak berbuat sesuai dengan nilai dianutnya. Dapat dikatakan bahwa nilai sebetulnya merupakan konsep abstrak dan hanya menjadi nyata dalam perbuatan. Tetapi, nilai bukanlah konsep yang tak tergapai melainkan ada manakala dia berfungsi dalam pikiran dan tindakan manusia (Kusmaryanto, 2016, hal. 31-32).

Dikatakan Haryatmoko bahwa konsep 'etika' sering digunakan sebagai persamaan dengan moral. Dari kedua istilah ini, terkandung nuansa dua tradisi pemikiran filsafat moral berbeda. Aristoteles, dalam buku *Ethique a'Nicomaque*, menulis selain kata *ethos*, yang bermakna 'kualitas suatu sifat' digunakan juga istilah *ethos*, yang bermakna kebiasaan. Arti *ethos* adalah suatu cara berfikir dan merasakan, cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas cara kepemilikan seorang terhadap kelompok. Istilah yang kedua ini relevan dengan terjemahan kata "moralis" (*mos, moris* = adat, kebiasaan) dalam bahasa Latin.

Istilah *moralis* selanjutnya menjadi istilah teknis yang tidak lagi berarti kebiasaan, tetapi mengandung arti “*moral*” sebagaimana digunakan dalam definisi terkini.

Mufid (2009, hal. 180) memandang etika lebih condong kearah ilmu tentang baik atau buruk. Etika lebih dikenal dengan kode etik. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau nilai yang berkenaan dengan baik-buruk. Ada dua kaidah dasar moral: *Pertama*, kaidah sikap baik, dimana seorang seharusnya bersikap baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan dalam bentuk yang konkrit, tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkrit itu. *Kedua*, kaidah keadilan, dimana sebagai prinsip kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban yang terpakai harus dipikul bersama, yang tentunya disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing.

Ada perbedaan antara *etika* dan *agama*. *Etika* mendukung keberadaan agama, dimana etika dapat membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran dalam memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran agama, yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional. Agama menuntut seorang untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Dalam agama terdapat etika, dan agama merupakan salah satu norma dalam etika. Keduanya bertalian satu sama lain, tetapi terpisahkan secara teoretis. Dalam konteks praktis, akan sulit mengenyampingkan salah satu diantaranya. Seorang tidak bisa berbuat hanya atas dasar agama saja tanpa memperhatikan etika atau sebaliknya. Keberagaman pada prinsipnya memperhatikan etika yang berlaku, sebaliknya, seorang dikatakan memiliki etika, jika kemudian memperhatikan agama yang ada (Mufid, 2009, hal. 180).

Yusuf al-Qardhawi mengklasifikasikan akhlaq menjadi tujuh kategori, sebagai tingkatan nilai-nilai moral (*moral values*) yang diharapkan dalam kehidupan muslim: akhlaq berhubungan dengan diri sendiri (*self*); *akhlaq* berhubungan dengan keluarga (*family*); *akhlaq* berhubungan dengan masyarakat (*society*); *akhlaq* berhubungan dengan dunia hewani (animal world); *akhlaq* berhubungan dengan lingkungan fisik (*physical environment*); dan *akhlaq* berhubungan dengan Khalik (*Creator*). *Akhlaq* merupakan suatu dunia plural (a plural world) tetapi kadang kala digunakan dalam bentuk tunggal (*khuluk*) atau *singular form*, yang berarti karakter (*character*), *innate disposition*, atau ‘*a state of the soul which causes it to perform its action without thought or deliberation*’. Banyak ilmuan Muslim, seperti al-Kindi; al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawayh, Nizam al-Mulk, al-Ghazali, al-Raz, dan al-Tusi, telah mempelajari dan menulis tentang *akhlaq*. ‘*Ilm-al-akhlaq (knowledge of moral values)* merupakan komponen mayor daripada *Islamic Studies* pada semua

level pendidikan Islam, disamping komponen lainnya, seperti *'Ilm al-Fiqh* (Halstead, 2007, hal. 285).

Karakter (*character*), dengan demikian, merupakan kumpulan dari berbagai aspek kepribadian yang melambangkan kepribadian seorang. Karakter merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah menyatu pada diri seorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku. Dikatakan Farid Anjar, dalam Ensiklopedi Inggris-Arab, bahwa *character education* sebagai pendidikan akhlak (Supiana, 2011, hal. 6). Sifat-sifat yang ada pada diri seorang itu, terdapat sifat yang menonjol/dominan, yang kemudian menjadi karakteristik seorang atau sekelompok orang. Sifat-sifat yang dimiliki manusia sangat ditentukan pendidikan yang mempengaruhinya. Pendidikan (Islam), dalam hal ini, dapat mengembangkan potensi baik dan dapat menekan potensi buruk manusia.

### **Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama**

Emile Durkheim, dalam *Education and Sociology* (1956) mengatakan bahwa pendidikan merupakan kelanggengan kehidupan manusia itu sendiri, yang dapat hidup konsisten dalam mengatasi ancaman dan tantangan masa depan (Rosyadi, 2004, hal. 124). Dengan kemajuan pendidikan diharapkan dapat mereduksi beragam fenomena sosial, bertalian dengan moralitas sosial dalam masyarakat. Sejak awal, persoalan moralitas telah menjadi perhatian *founding fathers*, seperti pentingnya pendidikan agama, moral dan budi pekerti dalam sistem pendidikan nasional. Seperti diketahui bahwa konsep moralitas yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat yang pluralistik diperlukan adanya solusi setidaknya sebuah tawaran yang substansi darinya yang meliputi keragaman konsep moral. Moralitas merupakan suatu sikap hati seorang yang terlihat dalam perilaku lahiriah. Moralitas terjadi apabila seorang mengambil sikap yang baik dikarenakan dia sadar akan kejiwaan dan tanggung jawab, bukan untuk mencari keuntungan dan tanpa pamrih. Sedangkan *defisien/defek moral* merupakan suatu kondisi individu yang hidupnya *delinquent* (nakal, jahat), sering melakukan kejahatan, berperilaku a-sosial atau anti-sosial, dan tanpa penyimpangan organik pada fungsi inteletnya. Hanya saja inteletnya tidak berfungsi, sehingga terjadi kebekuan moral yang kronis (Kartono, 2002, hal. 191).

Prinsip moralitas sosial (*social morality*) setidaknya memiliki nilai-nilai moral yang berdasarkan pada tiga prinsip dasar: kemerdekaan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan saling menerima (*reciprocity*). Bila tiga prinsip itu dijadikan landasan seorang dalam berpikir dan bertindak diharapkan melahirkan perilaku

moral yang tinggi menuju terbentuknya kepribadian yang baik. Perilaku moral yang bernilai tinggi merupakan perilaku yang tidak merugikan, menyakiti, menyiksa, mengganggu, serta memperkosa hak-hak orang lain. Hal yang seharusnya dilakukan yakni perilaku yang merujuk ada penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam nuansa nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal. Seorang yang bermoral senantiasa berpikir dan bertindak atas dasar pemikiran bagaimana keberadaan dirinya dapat mendatangkan lebih bermanfaat bagi kemaslahatan manusia lainnya (Sjarkawi, 2011, hal. 78-80).

Pengaruh terhadap konsep moralitas sosial yang dikonstruksikan bangsa kolonial misalnya tidak selalu tepat seperti yang diharapkan ideologi bangsa sendiri. Ideologi kolonial yang bersifat materialisme-kapitalis beda tentunya dengan konsep ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila. Pandangan materialisme-kapitalisme bahwa seorang dianggap baik dan bermoral bila sesuatu berguna dan bermanfaat secara material. Seorang dikatakan kurang bermoral dan nilai atau 'derajat'nya dalam masyarakat ketika seorang tidak mampu memberikan manfaat dan kegunaan secara material. Mungkin, bisa dikatakan bahwa seorang dianggap berhasil dan bermoral apabila memiliki prestasi tertentu, misalnya jabatan dan harta yang melebihi orang tuanya atau orang lain.

Adanya 'pergeseran' dalam pandangan moralitas sosial pada awalnya bisa pula dipengaruhi suatu ideologi kolonial atau dampak sains-teknologi yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Diceritakan Socrates, filosofis Yunani, pernah prihatin dan menangis atas penemuan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini juga telah membuat prihatin dan ketakutan mendalam bagi penguasa Yunani ketika itu. Socrates mencoba memasukkan ajaran moral ke dalam sendi-sendi kekuatan dan politik. Kemampuan intuitif dan kognitif Socrates memberi argumen kepada rakyat Yunani sehingga mampu mematahkan 'puisi-puisi' penguasa tentang pentingnya moral dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Bertens, 2002, hal. 45). Einstein juga pernah mengatakan bahwa 'dalam peperangan, ilmu menyebabkan manusia saling meracuni dan menjegal. Dalam perdamaian, ilmu membuat hidup dikejar waktu dan penuh tak menentu. Mengapa ilmu yang mudah menghemat kerja dan membuat hidup manusia lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit sekali bagi 'kita' kepada 'kita'? Einstein dan Socrates mungkin benar, ilmu pengetahuan ternyata mendatangkan malapetaka bagi manusia. Ilmu pengetahuan politik, ekonomi, sosial, informasi-komunikasi, teknologi, dan militer mendatangkan kesejahteraan sekaligus menimbulkan malapetaka bagi manusia.

Seperti diungkapkan seorang ahli sosiologi, Rene Descartes, bahwa ‘ilmu tanpa moral adalah buta, moral tanpa ilmu adalah bodoh’ (Hardiman, 2004, hal. 34).

Pengembangan moralitas sosial dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak (dengan nilai-nilai agama). Pendidikan moral tidak hanya mengandalkan pengembangan intelektual-kognitif, tetapi juga perlu membangun emosional-spiritual yang berfungsi sebagai jembatan antara penilaian dan tindakan. Sisi emosional-spiritual meliputi kualitas nurani (merasakan kewajiban melakukan untuk menjadi benar), harga diri, empati, mencintai, pengendalian diri dan kerendahan hati. Pendidikan moral berbasis agama (Islam) tentunya bersumber dari ajaran Islam (al-qur’an dan Al-hadits) yang membutuhkan pengamalan (*amaliyah*) dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa agama, karakter yang baik yang berbasis nilai-nilai agama dengan ‘mengetahui apa yang baik dan buruk’ (*‘amar ma ‘ruf nahi munar*), menginginkan yang baik (*hummah*), dan melakukan yang baik (*amal shalih*) (Octavia, 2014, hal. 17).

Pendidikan moralitas (*moral education*) dan pendidikan karakter (*character education*) secara substansial tidak banyak perbedaan. Pendidikan karakter mengacu pada tiga kualitas moral, yakni kompetensi (keterampilan, seperti mendengarkan, berkomunikasi dan bekerjasama), kehendak atau keinginan yang memobilisasi penilaian kita dan energi, dan kebiasaan moral (suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk merespon situasi secara moral baik). Pendidikan karakter, karenanya, lebih kompleks dari pada mengajar matematika sekalipun, dimana pendidikan karakter meniscayakan pengembangan kepribadian dan keterampilan. Hal ini merujuk pada tiga unsur utama dalam pembentukan karakter: mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Octavia, 2014, hal. 18). Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu sering kali dirangkum dari sejumlah sifat-sifat baik. Jadi, pendidikan karakter merupakan upaya untuk membimbing perilaku manusia untuk menuju standar-standar baku tentang sifat-sifat baik. Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan-tujuan etika, dan prakteknya meliputi penguatan kecakapan-kecakapan penting meliputi perkembangan sosial atau moralitas sosial kalangan anak-anak, remaja, dan pemuda.

Dalam UU Dasar 1945 dikatakan: ‘Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’. Atas dasar itu, maka dalam batang tubuh UUD 1945 diatur hal yang berhubungan dengan ketuhanan,

seperti tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Sebagai konsekuensi pentingnya sikap hidup agamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah membentuk Departemen Agama pada 3 Januari 1946. Tugas pokok Departemen Agama adalah mengurus permasalahan bertalian dengan kehidupan beragama bagi masyarakat Indonesia, salah satunya bertalian dengan masalah pendidikan agama (Ramayulis, 2012, hal. 363).

Dari sekian banyak permasalahan anak usia remaja dan pemuda, Zakiah Daradjat (2005, hal. 145-147) mengungkapkan bahwa permasalahan anak usia remaja dan pemuda dapat diklasifikasikan: (1) bertalian dengan masa depan dimana setiap remaja mendambakan masa depan yang lebih baik dengan penuh kepastian, tetapi kadang-kadang antara cita-cita (*ideal*) dan realitas (*actual*) tidak selalu sejalan, hal ini, akan lebih memudahkan mereka untuk berperilaku negatif; (2) bertalian dengan keluarga/orang tua, dimana adanya pertentangan antara anak-anak remaja dengan orang tua, yang bisa saja dipengaruhi faktor eksternal yang kurang edukatif; dan (3) bertalian dengan moral dan agama, dimana nilai-nilai moral yang tidak didasarkan dengan agama akan terus berubah sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat yang dapat berakibat kegoncangan bagi diri anak usia remaja dan pemuda karena merasa hidup tanpa pegangan. Nilai yang tetap hidup dan tidak berubah merupakan nilai agama yang absolut dan berlaku sepanjang zaman yang tidak terpengaruh oleh waktu, tempat dan keadaan.

Pengembangan pendidikan karakter (akhlak) dan kepribadian (Jalaluddin, 2012, hal. 201) usia anak-anak, remaja, dan pemuda dapat dilakukan dengan pentingnya revitalisasi pendidikan agama, yang pada akhirnya sebagai upaya penguatan moralitas sosial. Untuk itu, setidaknya ada tiga ‘iklim’ pendidikan yang berpengaruh kuat terhadap proses perkembangan moralitas sosial mereka (anak-anak, remaja, dan pemuda): keluarga/orang tua, sekolah dan masyarakat. Ketiganya tidak terpisah satu sama lain, bahkan saling bertautan dan membutuhkan dengan rangkaian tahapan-tahapan. Keluarga memiliki peran strategis dalam proses pendidikan anak, dan sama-sama bertanggung jawab dalam masalah pendidikan. Orang tua bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dan pengarahan yang benar yakni dengan menanamkan ajaran agama dan *akhlak al karimah* (Idi & Hd, 2016, hal. 151).

Keluarga memerlukan suatu teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Misalnya, jika anak melihat orang tuanya selalu berbuat baik terhadap ibu bapak mereka (nenek dan kakek), selalu mendoakan dan meminta ampunan Allah Swt. untuk mereka, selalu menanyakan berita dan keadaan mereka, menenangkan hati mereka, memenuhi kebutuhan mereka dan memperbanyak doa, menyambung tali silaturahmi dengan orang lain yang bersahabat dengan mereka, menziarahi kubur mereka (sudah wafat) bersadaqah, maka atas izin Allah Swt, anak itu akan meniru akhlak mulia ini. Pendidikan Islam memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan pengetahuan dan membina akhlak anak didik (al-Adawy, 2009, hal. 23). Al-Ghazali dalam Hamid Reza Alavi (2007, hal. 238-296) mengungkapkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu *tabula rasa* (kertas putih), dimana orang tua bertanggung jawab mengembangkannya, baik bertalian dengan perkembangan bahasa, tradisi kultur, dan keyakinan moral dan praktiknya. Orang tua yang berperan dalam mengembangkan karakter yang baik dalam kehidupan anak-anaknya dikemudian hari.

Dikatakan Jalaluddin (2015, hal. 178) bahwa Islam menempatkan fungsi dan peranan orang tua begitu penting dalam pendidikan, terkhusus dalam pendidikan keluarga. Dalam keluarga, orang memiliki peran utama, dimana suatu peran yang paling menentukan keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak-anak mereka, khususnya dalam hubungannya dengan pembentukan kepribadian. Dalam keluarga, orang tua terutama bapak (ayah) menempati posisi sebagai sosok teladan bagi putera-puteri mereka, yakni sosok sebagai model dalam pembentukan kepribadian mereka.

Selain itu, madrasah juga memiliki peranan strategis dalam mengembangkan moralitas sosial usia anak-anak dan remaja. Arief Subhan (2012, hal. 80) mengungkapkan bahwa madrasah merupakan khazanah lembaga pendidikan Islam yang diwariskan generasi muslim terdahulu. Pada periode modern, madrasah digunakan sebagai bentuk lembaga pendidikan yang memiliki ciri-ciri modern. Pada abad ke-20, dimana sebagai periode kebangkitan madrasah di Indonesia, kaum muslimin menggunakan madrasah sebagai symbol lembaga pendidikan Islam modern dengan ciri-ciri lembaga pendidikan klasikal, kurikulum terstruktur, ujian direncanakan periodik, kenaikan kelas dan sertifikat tanda lulus. Sistem pendidikan madrasah ini pada awalnya ditujukan dalam bentuk sistem klasikal dimana siswa dapat memperoleh pendidikan agama dan umum dengan berimbang. Dalam perkembangannya, peran dan kontribusi madrasah sangat signifikan, sejak

berdirinya Departemen Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946 (Maksun, 1999, hal. 123).

Dalam perkembangannya, madrasah telah banyak mengalami perubahan secara kuantitatif dan bahkan kualitatif. Hingga 1990-an, masyarakat masih memiliki interest yang lebih tinggi terhadap sekolah umum yang dinilai memiliki *prestise* yang lebih baik daripada madrasah. Disamping kualitas lebih baik, dengan masuk sekolah umum agaknya diandang lebih terbuka terhadap beragam jenis lapangan pekerjaan. Kini, *image* itu sudah mulai berubah karena sejumlah madrasah di kota-kota besar mulai menunjukkan kualitasnya yang lebih baik dan sejajar dengan sekolah umum. Salah satu kelebihan madrasah, kurikulumnya cenderung universal dan tidak mendikotomikan ilmu agama dan ilmu umum (Idi & Hd, 2016, hal. 166).

Selanjutnya, keberadaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan universitas memiliki peranan strategis pula terhadap pembentukan karakter (akhlak) dan keperidian serta moralitas sosial anak-anak, remaja dan generasi muda. Zakiah Daradjat (2005, hal. 147) menulis bahwa persoalan anak-anak, remaja dan pemuda sangat banyak seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Daradjat menganjurkan pentingnya upaya pembinaan anak usia remaja, pemuda dan mahasiswa. Membina kehidupan beragama di sekolah dan universitas dengan sasaran kehidupan beragama pada mereka usia muda dalam pertumbuhannya, sekitar umur 18-24 tahun. Pemuda pada usia ini diklasifikasikan pada usia remaja dan dewasa muda yang bukan lagi anak-anak yang selalu dapat dinasihati, dididik dan diajarkan dengan mudah. Untuk itu, Muhaimin mengungkapkan jika krisis akhlak atau moral merupakan pangkal dari krisis multi-dimensional, sedangkan pendidikan agama Islam banyak menggarap masalah akhlak, maka perlu ditelaah apa yang menjadi penyebab titik lemah dari pendidikan agama itu (Muhaimin, 2010, hal. 22-23). Seperti diungkapkan Mochtar Buchori (1992), Muhammad Maftuh Basyuni (2004), bahwa pendidikan agama mengalami kegagalan karena mengandalkan aspek kognitif yang mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral. Pada hal, dikatakan Harun Nasution (1995), intisari dari pendidikan agama adalah pendidikan moral (Muhaimin, 2010, hal. 23).

Selanjutnya, pesantren (Mastuhu, 1994, hal. 61; Dhofier, 1994, hal. 44) memiliki peranan strategis dalam mengembangkan moralitas sosial anak usia sekolah, remaja dan pemuda. Abdul Malik Fajar (1998, hal. 9) mengungkapkan bahwa pesantren tidak hanya mampu menjalankan fungsi tradisionalnya tetapi

pesantren dalam mengembangkan pendidikan formalnya, menyebabkan keberadaan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dalam masyarakat sedikit mengalami perubahan. Masyarakat tidak lagi memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kurang menjanjikan masa depan dan kurang resonsif terhadap tuntutan dan permintaan saat ini dan masa datang. Bagaimanapun juga dalam memilih pendidikan anak-anaknya, orang tua setidaknya mempertimbangkan tiga hal penting: nilai (agama), status sosial, dan cita-cita. Hal ini, sejalan dengan pandangan Abdurrahman Mas'ud (2002, hal. 26-34) bahwa hakikat dan watak pesantren baik sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai sosio-kultural politik, merupakan refleksi pesantren sebagai sebuah budaya yang unik. Karakteristik budaya pesantren, antara lain: *modeling* (ajaran Islam/uswatun khazanah), *cultural resistance* (mempertahankan budaya) dan budaya keilmuan yang tinggi.

Jadi, persoalan pembinaan pendidikan karakter (akhlak) dan kepribadian pada anak usia sekolah, remaja dan mahasiswa/pemuda merupakan investasi sosial yang paling krusial. Dalam upaya membenahi merosotnya moralitas sosial. Maju-mundurnya bangsa sangat teretak pada moralitas sosial, oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) paling diutamakan. Penanaman nilai-nilai pendidikan agama (Islam) memerlukan kontribusi optimal dari: keluarga/orang tua, sekolah/madrasah/universitas, masyarakat (kegiatan keagamaan dan majelis ta'lim), dan pemerintah (melalui kebijakan strategis yang berpihak kepada segenap aspirasi masyarakat yang pluralistik).

### **Kesimpulan**

Berbagai fenomena sosial pada dekade terakhir cenderung mengarah pada suatu kondisi degradasi atau 'pergeseran' moralitas sosial tanpa terkendali. Jika kondisi ini tanpa perhatian semua elemen berbangsa maka biasa saja berdampak pada proses disorientasi arah dan tujaun kehidupan berbangsa. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan moralitas sosial dari berbagai elemen berbangsa dengan pengembangan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak bagi generasi muda dalam beragam level umurnya (anak-anak, remaja, dan pemuda) deyarakanan perlunya revitalisasi dan optimalisasi peran institusi keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai 'tri pusat' pendidikan agama.

Kemajuan bangsa memperhatikan adanya keseimbangan pembangunan fisik-material dan non-fisik-spiritual, sesuai dengan tujuan filosofis pembangunan nasional. Keduanya sama pentingnya, oleh karenanya, bila terjadi ketimpangan salah satunya akan berdampak pada disorientasi pembangunan nasional. Suatu

bangsa tidak pernah akan mengalami kemajuan dan ber peradaban apabila anomali sosial yang melanda anak-anak, remaja, dan generasi muda. Semaju apapun pembangunan fisik-material pada suatu bangsa akan sulit terwujud menjadi maju (*developed country*) tanpa didukung kualitas moralitas sosial (*social morality*) yang optimal pula. Sebagai upaya penguatan moralitas sosial berbangsa ke depan, diperlukan perhatian seksama dan komitmen terhadap pentingnya keberpihakan dan optimalisasi pengembangan pendidikan karakter (akhlak) bagi semua ‘anak bangsa’ dengan identitas berbeda dalam masyarakat pluralistik secara sistemik dan integral.

## Daftar Pustaka

- al-Adawy, S. M. (2009). *Fikih Pendidikan Anak*. Jakarta: Qisthi press.
- Alavi, H. R. (2007, September ). Islamic Vlues: a distinctive framework for moral education. *Journal of Moral Education*, 36(3), 283-296.
- Bertens, K. (2002). *Sejarah Filsafat Yunani*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daradjat, Z. (2005). *Ilmu Jiwa Agama*. Bandung: Bulan Bintang.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi Kasus tentang Kehidupan Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Fajar, A. M. (1998). *Madrasah dan tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Hall, C. S., & Lindsey, G. (1993). *Psikologi Kepribadian 2 Teori-teori Holistik (Organismik-Fenomenologis)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Halstead, J. M. (2007). Islamic values: a distinctive framework for moral education? *Journal of Moral Education*, 36(3).
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Idi, A., & Hd, S. (2016). *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jalaluddin. (2012). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jalaluddin. (2015). *Mempersiapkan Anak Sholeh*. Palembang: Noerfikri.
- Kartono, K. (2002). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Kusmaryanto, C. B. (2016). *Bioetika: Mendiskusikan pertanyaan dasar tentang hidup manusia yang menyangkut berbagai disiplin ilmu*. Jakarta: KOMPAS.
- Levine, D. U., & Havighurst, R. J. (1989). *Society and Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Lickona, T. (1993, November 1). The Return of Character Education. *Educational Leadership*, 51(3), 6-11.
- Maksun. (1999). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mas'ud, A. (2002). *Sejarah dan Budaya Pesantren dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mufid, M. (2009). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Octavia, L. (2014). *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*. Jakarta: Rene Book dan Rumah Kitab.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosyadi, K. (2004). *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sagala, S. (2013). *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sjarkawi. (2011). *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subhan, A. (2012). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-21: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Supiana. (2011). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam. *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemiikiran Islam Indonesia*.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.